

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Di Kabupaten Jombang

Suparto¹, Machwal Huda², Farichatun Nisa³, Muhammad Syafi'ul Munir⁴

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang

Email: nafisuparto@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar didunia dan terletak di antara benua Asia dan Australia yang dihimpit dua lautan yaitu Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki 17.508 pulau, kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, Indonesia juga terletak di wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana geologis. Indonesia berada dalam area yang tidak stabil karena terletak di atas lokasi yang dikenal dengan istilah "*ring of fire*" yaitu zona pertemuan lempeng-lempeng bumi dan dikelilingi oleh gunung api, terdapat dua jalur gunung api besar dunia dan beberapa jalur pegunungan lipatan dunia pun saling bertemu di Indonesia kondisi tersebut merupakan bagian dari hasil proses pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Salah satu daerah yang berada di Indonesia yaitu kabupaten Jombang dengan karakteristik geografis dan demografinya juga memiliki risiko bencana yang signifikan, sehingga kesiapsiagaan masyarakat, khususnya relawan, menjadi krusial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPBD Kabupaten Jombang dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak BPBD dan perwakilan relawan, observasi partisipatif, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Jombang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapasitas relawan melalui berbagai inisiatif. Inisiatif tersebut meliputi penyelenggaraan pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan secara berkala, sosialisasi informasi terkini mengenai potensi bencana, dan pembentukan forum komunikasi antar relawan untuk memastikan koordinasi yang efektif.

Kata Kunci: Peran BPBD, Kesadaran Bencana, Relawan, Penanggulangan Bencana.

ABSTRACT

Indonesia is the world's largest archipelago, located between the continents of Asia and Australia, sandwiched between two oceans: the Indian and the Pacific. Indonesia boasts 17,508 islands, boasting extraordinary natural resources and beauty. Indonesia is also situated in an area prone to various geological disasters. Indonesia lies in an unstable area, situated on the "Ring of Fire," a zone where Earth's plates meet, surrounded by volcanoes. Indonesia is home to two major volcanic belts, and several folded mountain ranges converge. These conditions are the result of the convergence of three major tectonic plates: the Indo-Australian, Eurasian, and Pacific plates. Jombang Regency, one of Indonesia's regions, with its geographic and demographic characteristics, also poses a significant disaster risk, making community preparedness, particularly for volunteers, crucial. This study aims to determine the role of the Jombang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) in raising disaster awareness among volunteers. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in- depth interviews with BPBD officials and volunteer representatives, participant observation, and documentation. The research findings indicate that the Jombang Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) plays a strategic role in enhancing volunteer capacity through various initiatives. These initiatives include conducting regular mitigation and preparedness training, disseminating up-to-date information on potential disasters, and establishing a communication forum for volunteers to ensure effective coordination.

Keywords: BPBD Role, Disaster Awareness, Volunteers, Disaster Management.

PENDAHULUAN

Posisi geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng utama dunia dan Cincin Api Pasifik menyebabkannya menjadi negara yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung berapi(Nurmasari et al., 2016). Selain itu, faktor iklim tropis juga membuat Indonesia rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Menanggapi kerentanan ini, pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah, yang landasan hukumnya tertuang dalam (UU no 24, 2007) tentang Penanggulangan Bencana.

Bencana merupakan keniscayaan yang dapat terjadi dalam waktu yang tidak dapat diperkirakan dan dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Bencana merupakan sebuah misteri dalam kehidupan dan penghidupan manusia, tindakan yang dapat

dilakukan adalah mempersiapkan upaya-upaya guna mengurangi risiko korban bencana. Bencana sendiri menurut (UU no 24, 2007) adalah sesuatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam dan faktor manusia. Bencana terbagi menjadi tiga yaitu bencana alam, non-alam dan sosial.

Pertama, bencana alam menurut BNPB adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; **Kedua, bencana non-alam** adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit sedangkan; Ketiga, bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror (UU no 24, 2007).

Bencana di Indonesia telah mendorong masyarakat untuk menunjukkan dukungan, dan bantuan hal ini dikarenakan bencana bukan saja urusan pemerintah saja akan tetapi urusan bersama, dengan kemampuan dalam negeri yang tidak memadai Keterlibatan dan dukungan non-pemerintah dapat memperkuat upaya para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di Indonesia dalam penanggulangan bencana. Upaya tersebut dapat berupa penguatan tanggap bencana, penurunan risiko dan ancaman bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, dan percepatan pemulihan, dalam penanganan bencana di Indonesia.(Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2021)

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang memiliki risiko bencana yang tinggi, meliputi banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Data menunjukkan tren kejadian bencana yang fluktuatif dari tahun ke tahun, menyoroti pentingnya upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam konteks ini, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan perlu melibatkan partisipasi masyarakat, terutama relawan bencana, sebagai elemen penting dalam siklus penanggulangan bencana(portal resmi pemerintah kabupaten jombang, 2021).

BPBD Kabupaten Jombang memegang tugas strategis untuk membina dan meningkatkan kapasitas relawan agar lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat. Melalui berbagai program, BPBD diharapkan mampu membentuk sinergi yang baik dengan relawan demi mengoptimalkan upaya penanggulangan bencana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada "Bagaimana Peran BPBD Dalam Peningkatan Kesadaran Bencana Pada Kalangan Relawan Bencana Di Kabupaten Jombang"(peraturan daerah, 2011).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan realita mengenai kondisi di lapangan secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor yang ada. Data sekunder yang mendukung penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan literatur-literatur (laporan dari BPBD) serta hasil wawancara dari beberapa sumber. Lokasi penelitian difokuskan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan kunci terdiri dari dua pegawai BPBD Kabupaten Jombang dan perwakilan dari berbagai organisasi relawan, seperti BAGANA, ORARI, dan SEMAR(Sugiyono, 2019)Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan kredibilitas informasi yang diperoleh. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data (memilah data yang relevan), penyajian data (mengorganisir informasi secara sistematis), dan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisi geologi dan hidrogeologi, Kabupaten Jombang termasuk dalam wilayah Sub Cekungan Air Bawah Tanah Mojokerto, yang merupakan bagian dari cekungan air bawah Brantas yang sebarannya berada di wilayah Sungai Brantas. Aliran air bawah tanah di wilayah Kabupaten Jombang dibagi menjadi dua bagian, yaitu aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari arah barat-selatan (wilayah cekungan air bawah tanah Kediri- Nganjuk dan perbukitan vulkanik/Wonosalam), dan aliran air bawah tanah yang mengalir ke sungai Brantas dari utara (wilayah perbukitan struktural/Kabuh).

Kawasan – kawasan yang rawan bencana pada dasarnya memerlukan perhatian khusus dan antisipasi yang lebih. Kawasan rawan bencana alam merupakan suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam, terdiri dari bencana tanah longsor, banjir dan puting beliung. Sedangkan, kawasan bencana geologi berupa gempa tektonik.

Berikut beberapa wilayah di Kabupaten Jombang yang menjadi kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis bencana masing – masing:

1) Kawasan Rawan Bencana Geologi (Gempa Tektonik)

Berikut beberapa wilayah yang berpotensi timbul gempa tektonik di Kabupaten Jombang. Bahaya dari aspek geologi tanah di Kabupaten Jombang antara lain berada diwilayah :

- a. Kecamatan Plandaan;
- b. Kecamatan Kabuh;
- c. Kecamatan Ngusikan ;
- d. Sebagian Kecamatan Megaluh dan BandarKedungmulyo.

2) Kawasan Rawan Bencana Erosi dan Longsor

Erosi tanah dipengaruhi oleh faktor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besar dari pada tanah sawah, oleh karena itu usahapertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relatif tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah, adapun Kecamatan yang rawan terkena longsor adalah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Ngusikan, dan Kecamatan Plandaan, Kudu, Kabuh.

Secara topografis, Kecamatan Wonosalam terletak pada posisi topografi paling tinggi (lereng tengah-atas), sementara itu Kecamatan Bareng, Mojoagung dan Mojowarno terletak pada lereng kaki Gunung Anjasmoro(Jombang n.d.).

3) Kawasan rawan Banjir

Banjir paling parah berpotensi terjadi di Kabupaten Jombang terdapat di wilayah Mojowarno karena limpahan dari Kali Putih, Wilayah Mojoagung dan Sumobito karena wilayah tersebut menjadi pertemuan tiga sungai, yaitu Kali Gunting, Catakabanteng dan Kali Pancir. Wilayah Kecamatan Tembelang dan Kecamatan Kesamben akibat luapan Kali Ngotok Ring Kanal dan afvour Watudakon. Wilayah Kecamatan Plandaan akibat luapan Kali Beng, Wilayah Kecamatan Kabuh dan Kecamatan Plosok akibat luapan Kali Marmoyo,serta Wilayah Kecamatan Bandarkedungmulyo akibat luapan Kali Konto.

Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah banjir atau genangan yang ada di Kabupaten Jombang: Kecamatan Plandaan, Kecamatan Ngusikan, Kecamatan Kudu, Kecamatan Plosok, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Tembelang, Kecamatan Megaluh, Kecamatan Peterongan, Kecamatan Jombang, Kecamatan Bandarkedungmulyo, Kecamatan Sumobito, Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Gudo, Kecamatan Jogoroto, Kecamatan

Mojowarno, dan Kecamatan Diwek, Kecamatan Perak. Luas kawasan rawan banjir 1.585,72 Ha. Sungai - sungai yang menyebabkan banjir pada wilayah - wilayah tersebut diatas sebagian besar menjadi kewenangan pusat dan provinsi (Kusnuardi 2011).

4) Penyebaran Bahaya Angin Puting Beliung

Berikut wilayah yang secara historis merupakan wilayah yang pernah terkena bahaya angin puting beliung yang ada di Kabupaten Jombang adalah :

- a) Kecamatan Bandarkedungmulyo
Ds. Mojokambang, Dsn. Mojotengah, Kemendung, Krembung, Wonorejo)
- b) Kecamatan Perak
Desa Plosogenuk (DsSukorejo), Ds Kalangsemanding dan Ds Glagahan
- c) Kecamatan Ngoro
Ds. Genukwatu (Dsn. Genukwatu, Godong), Ds. Sugihwaras (Dsn. Cermenan), Ds. Gajah (Dsn. Gandan), Ds. Ngoro (Dsn. Pandean, Ngoro kidul), Ds. Kauman(Dsn. Kauman ,Dsn. Genggeng), Ds. Sugihwaras (Dsn. Cermenan), Ds. Gajah (Dsn. Gandan), Ds. Rejoagung (Dsn. Genggeng), Ds. Gabusbanaran, Ds. Sentul, Ds. Pesantren (pemerintah kabupaten jombang 2021).

4.1.1 Kemiringan Lereng

Kemiringan wilayah Kabupaten Jombang dapat dibedakan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

1. Kelerengan 0-2% meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jombang kecuali Kecamatan Wonosalam;
2. Kelerengan 2-5% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mojowarno, Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Jombang, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
3. Kelerengan 15%-40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Kudu, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan;
4. Kelerengan >40% meliputi sebagian wilayah Kecamatan Bareng, Wonosalam, Mojoagung, Sumobito, Ngusikan, Kabuh dan Plandaan. (Adi et al. 2022)

4.1.2 Iklim dan Curah Hujan

Keadaan iklim pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor hujan. Wilayah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh iklim tropis dengan angka curah hujan rata-rata berkisar 1.800 mm/tahun dan temperatur antara 20 °C – 32 °C. Seperti umumnya di daerah lain, Kabupaten Jombang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun

Klimatologi, curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari, Maret, November dan Desember. Sedangkan pada bulan Juni, Juli, dan Agustus curah hujan relatif rendah (BPS Kabupaten Jombang 2022).

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang 18 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang memiliki tugas pokok membantu Bupati untuk menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang pencegahan, penanggulangan bencana, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi akibat bencana, dalam melaksanakan tugas pokok, BPBD memiliki fungsi untuk :

- 1) Penyusunan, perumusan rencana program dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan urusan sekretariatan.

Selanjutnya agar kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan baik, maka dirumuskan tugas pokok dan fungsi setiap seksi. Terdapat berbagai peran yang dilakukan BPBD Kabupaten Jombang, yaitu:

1. Peran Strategis BPBD dalam Peningkatan Kapasitas Relawan

BPBD Kabupaten Jombang memainkan peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas relawan bencana. Pegawai BPBD menyatakan bahwa lembaga mereka secara rutin mengadakan pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, dan koordinasi lintas sektor. Program seperti "Sekolah Sungai" dan "Desa Tangguh Bencana" juga diinisiasi dengan melibatkan relawan sebagai fasilitator utama di masyarakat. Peran ini dirasakan sangat positif oleh para relawan. Perwakilan dari BAGANA (Banser Tanggap Bencana) menyatakan bahwa BPBD sering melibatkan mereka dalam pelatihan dasar kebencanaan, manajemen posko, dan simulasi di daerah rawan bencana, yang berdampak pada peningkatan kesiapan dan pemahaman prosedur yang benar. Hal senada diungkapkan oleh relawan dari ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) yang dilibatkan dalam pelatihan komunikasi darurat untuk memastikan jalur informasi tetap berfungsi saat bencana. Relawan SEMAR (Semangat Masyarakat Relawan) juga mengapresiasi pelibatan mereka dalam berbagai pelatihan yang membuat mereka lebih memahami risiko dan cara penanganan bencana di wilayahnya.

Adapun dari berbagai penjelasan dari salah satu anggota BAGANA, Sakroni menyampaikan tentang peranan BPBD dalam melibatkan dalam pelatihan dasar kebencanaan dan manajemen posko. Selain itu, juga dilibatkan dalam simulasi di daerah rawan bencana. Sehingga kegiatan yang dilakukan sangat berdampak dalam membangun kesiapsiagaan dalam mengetahui prosedur yang benar serta distribusi informasi ke masyarakat dengan lebih tepat.

Selain itu tanggapan dari salah satu anggota ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan menyampaikan bahwa biasanya dilibatkan dalam pelatihan komunikasi darurat. Dalam simulasi bencana, kami bertugas memastikan jalur komunikasi tetap berjalan saat sinyal konvensional terputus. BPBD juga memberikan pelatihan teknis untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kami saat tanggap darurat. Kerja sama ini dianggap sangat membangun pemahaman serta mengomunikasikan informasi bencana secara cepat, akurat, dan terstruktur. Kesadaran kami sebagai relawan juga meningkat karena sering mendapat materi kebencanaan langsung dari BPBD.

Begitu pula keterangan salah satu anggota SEMAR, M. Rizky Efendi, juga mengatakan bahwa beberapa kali diundang dalam pelatihan penanggulangan bencana. BPBD juga memberi kami pemahaman tentang jenis-jenis bencana di Jombang dan bagaimana cara menghadapinya. Kami diajari bagaimana mengevakuasi warga dan memberikan pertolongan pertama.

“Sekarang kami lebih paham risiko bencana, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti daerah aliran sungai. Kami juga bisa menyampaikan edukasi mitigasi bencana kepada warga sekitar.”

Eko sebagai salah satu relawan TAGANA sebagai mitra dalam penanggulangan bencana di kabupaten Jombang menuturkan bahwa BPBD selalu menggandeng kami dalam setiap kegiatan baik pelatihan ataupun edukasi kepada masyarakat, tentu hal ini sangat berdampak pada penanganan bencana pada skala kecil.

Adapun salah satu relawan RAPI (radio antar penduduk Indonesia) Saudara menyampaikan bahwasannya beberapa tahun ini BPBD aktif dalam memberikan pelatihan dan simulasi kepada kami baik dari segi komunikasi ataupun kegawat daruratan lainnya. Begitupun Isnan sebagai ketua organisasi SENKOM mengatakan bahwa begitu banyak ilmu yang di dapat dari BPBD selama berkegiatan bersama ataupun sekedar ngopi bareng sambil sharing tentang ilmu kebencanaan, hal ini membuat anggotanya memiliki kemampuan yang hampir merata satu sama lainnya dalam hal penanganan apabila terjadi bencana.

Sebagai salah satu lembaga yang membawa bendera organisasi kami LPBI-NU cukup mendapatkan ilmu untuk membuat anggota kami sadar akan kegawatdaruratan khususnya bencana, dalam hal ini kami berterima kasih kepada BPBD karena selalu melibatkan kami dalam setiap penanganan bencana dan pelatihan yang diadakan seperti yang dituturkan saudara Hasan sebagai salah satu punggawa LPBI-NU kabupaten Jombang.

Sebagai salah satu anggota GATANA Saudara Arif Priwo. W menuturkan bahwa pembentukan Gatana (Gambiran Tanggap Bencana) pertama kali diinisiasi oleh BPBD dalam hal ini perannya sangat sentral dalam pembentukan relawan di desa kami. Begitupun dengan Eka Sapta ketua penggerak ILKJ (info lantas dan kriminal jombang) awal bertemu dengan BPBD ialah saat ada kejadian bencana banjir di wilayah kecamatan Kesamben, ia menuturkan pertama kali gabung masih bingung dengan tugas dan fungsi dari ILKJ akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian dia diundang untuk mengikuti sebuah pelatihan penanganan bencana untuk komunitasnya dan sekarang saya dan anggota sudah tahu apa yang akan kami lakukan.

Wahyu Subianto menuturkan ISJ dalam 3 tahun terakhir selalu mendapat undangan dalam hal sosialisasi ataupun pelatihan dalam penanganan bencana hal ini membuat komunitas kami semakin aktif dalam penanganan bencana di kabupaten Jombang, hal ini cukup positif dalam perkembangan komunitas kami.

FPRB merupakan forum yang digunakan oleh masyarakat jombang untuk membahas isu kebencanaan yang ada di kabupaten Jombang, hal ini juga akan sangat berpengaruh dalam penanganan dari BPBD kepada masyarakat, kami cukup mendapatkan bekal ilmu yang cukup banyak mulai dari pelatihan sampai manajemen posko, hal ini disampaikan Lutfi salah satu anggota FPRB Jombang.

2. Bentuk Pelatihan dan Kerja Sama

BPBD Jombang memberikan pelatihan dalam berbagai bentuk, mencakup pelatihan dasar penanggulangan bencana, penggunaan alat evakuasi, pertolongan pertama, hingga manajemen posko dan logistik. Pelatihan ini dilakukan secara berkala, terutama menjelang musim penghujan, dan seringkali bekerja sama dengan TNI dan Polri. Para relawan mengonfirmasi partisipasi mereka dalam berbagai pelatihan teknis, seperti evakuasi korban banjir, penggunaan perahu karet, dan manajemen dapur umum, yang mereka anggap sangat bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas di lapangan.

Bentuk kerja sama antara BPBD dan komunitas relawan terjalin secara formal

maupun informal. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada respons saat tanggap darurat, tetapi juga meliputi pelatihan bersama, penyebaran informasi peringatan dini, dan pendampingan program Desa Tangguh Bencana (Destana). Relawan merasa memiliki jalur koordinasi yang jelas dan dilibatkan secara aktif, mulai dari patroli di titik rawan bencana hingga penyuluhan kepada masyarakat. Kemitraan ini berhasil membentuk sistem penanggulangan bencana yang partisipatif dan kolaboratif di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPBD Jombang memiliki peran aktif dan komprehensif dalam memberikan pelatihan kepada relawan bencana. Bentuk pelatihan yang diberikan mencakup aspek teknis, manajerial, hingga komunikasi darurat. Respon para relawan menunjukkan bahwa pelatihan ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan:

- a) Kesiapsiagaan dan keterampilan mereka;
- b) Koordinasi antarorganisasi saat bencana;
- c) Kemampuan mereka mengedukasi masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan dari BPBD menjadi fondasi penting dalam membangun ketangguhan daerah terhadap bencana.

3. Bentuk Kerja Sama Antara BPBD Dengan Komunitas Relawan Atau Organisasi Masyarakat

Bentuk kerja sama antara BPBD dengan komunitas relawan atau organisasi masyarakat selama ini terjalin dengan baik, hal ini sesuai dengan pernyataan pegawai BPBD Kabupaten Jombang, Bagus Kurniawan menjelaskan : "Tentu saja, kami menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas relawan seperti BAGANA, SEMAR, ORARI, RAPI, PMI, dan juga organisasi masyarakat seperti Karang Taruna serta kelompok tani. Bentuk kerja sama ini bersifat formal maupun informal, tergantung pada kegiatan.

Contoh kerjasama yang pernah dilakukan bersama meliputi pelatihan bersama, pelaksanaan simulasi bencana, penyebaran informasi peringatan dini, serta pembentukan dan pendampingan Desa Tangguh Bencana (Destana). Mereka juga kami libatkan dalam setiap respon bencana untuk membantu evakuasi, logistik, dan komunikasi.

Agus Irmawan selaku pegawai BPBD menambahkan menyampaikan bahwa kerja sama ini meliputi pelatihan bersama, pelaksanaan simulasi bencana, penyebaran informasi peringatan dini, serta pembentukan dan pendampingan Desa Tangguh

Bencana (Destana). Mereka juga kami libatkan dalam setiap respon bencana untuk membantu evakuasi, logistik, dan komunikasi.

Salah satu anggota BAGANA, Sakroni menambahkan bahwa sering dilibatkan dalam pelatihan bersama dan kegiatan tanggap darurat. Kalau ada bencana, biasanya kami langsung berkoordinasi dengan BPBD untuk membantu evakuasi warga dan distribusi bantuan. Kami juga dilibatkan dalam penyuluhan ke masyarakat..

“selama ini komunikasi dengan BPBD cukup intens. Saat ada agenda pelatihan atau simulasi, kami selalu diundang.”.

Selain itu tanggapan dari salah satu anggota ORARI, Saudara Wahyudi menambahkan bahwa ada kerja sama, terutama dalam hal komunikasi darurat. Kami menyediakan jaringan radio untuk mendukung komunikasi saat terjadi bencana. Kami juga dilibatkan dalam simulasi penanggulangan bencana dan pelatihan bersama BPBD.

“Hubungan kami cukup baik. BPBD juga memberi kami akses untuk berkoordinasi langsung saat ada kondisi darurat, jadi komunikasi bisa cepat dan efisien..”

Begini pula keterangan salah satu anggota SEMAR, M. Rizky Efendi, menyampaikan bahwa sering dilibatkan dalam patroli lapangan saat musim hujan, terutama di titik-titik rawan banjir atau longsor. Kami juga ikut dalam simulasi dan pelatihan relawan yang diadakan oleh BPBD.

“Kami jadi punya jalur koordinasi yang jelas. Ketika ada informasi potensi bencana, kami segera menyebarkannya ke warga dan membantu upaya mitigasi di lapangan.”

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa BPBD Jombang menjalin kerja sama yang erat dan aktif dengan berbagai komunitas relawan serta organisasi masyarakat. Kerja sama ini tidak hanya terbatas pada tanggap darurat, tetapi juga mencakup aspek: Pencegahan (mitigasi), Kesiapsiagaan (pelatihan & simulasi), Respons cepat (evakuasi & distribusi logistik), dan Pemulihan pascabencana. Relawan merasa dihargai dan dilibatkan secara langsung dalam berbagai kegiatan kebencanaan, sehingga hubungan kemitraan ini membentuk sistem penanggulangan bencana yang partisipatif dan kolaboratif di tingkat daerah.

4. Efektivitas Peran BPBD dan Tantangan yang Dihadapi

Menurut pandangan relawan, peran BPBD dalam memberikan pemahaman dan

kesadaran bencana dinilai sangat efektif. Pelatihan yang diberikan rutin, terstruktur, dan tepat sasaran, sehingga tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga mendorong relawan menjadi agen edukasi di lingkungannya. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Dari sisi BPBD, tantangan utama adalah tingkat partisipasi relawan yang belum merata, keterbatasan waktu relawan yang juga memiliki pekerjaan, serta tantangan anggaran dan logistik untuk menjangkau seluruh komunitas. Dari sisi relawan, tantangan yang dirasakan meliputi informasi kegiatan yang terkadang mendadak, jadwal pelatihan yang berbenturan dengan jam kerja, serta keterbatasan peralatan di lapangan. Selain itu, sinkronisasi sistem komunikasi antar-organisasi saat terjadi bencana juga menjadi tantangan teknis yang perlu diatasi dan berharap relawan tidak hanya aktif saat bencana terjadi, tetapi juga berperan aktif dalam tahap pra-bencana, terutama dalam hal edukasi dan mitigasi risiko di lingkungan masing-masing mereka bisa menyosialisasikan jalur evakuasi, memberi penyuluhan ke masyarakat soal kesiapsiagaan, dan melibatkan warga dalam simulasi bencana. Kami berharap relawan juga membentuk jaringan kewaspadaan berbasis komunitas, misalnya sistem peringatan dini lokal.(Nuriana et al., 2020).

Meskipun dirasakan efektif, namun terdapat beberapa tantangan masih dihadapi serta perlu menjadi perhatian bersama, yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya

Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial, fasilitas, maupun sumber daya manusia. Pelatihan dan penyuluhan yang intensif memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, ketersediaan alat peraga, simulasi, dan lokasi pelatihan yang memadai juga seringkali menjadi kendala. BPBD Jombang mungkin perlu mencari skema pendanaan alternatif atau bermitra dengan organisasi lain untuk mengatasi hal ini.

2. Tingkat Pengetahuan dan Pengalaman Relawan

Relawan bencana datang dari berbagai latar belakang dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Menyelaraskan materi pelatihan agar sesuai untuk semua tingkatan menjadi tantangan tersendiri. Ada relawan yang sudah sangat berpengalaman, sementara yang lain mungkin baru pertama kali terlibat. BPBD perlu mengembangkan modul pelatihan yang berjenjang atau menyediakan materi adaptif untuk mengakomodasi perbedaan ini.

3. Jarak dan Waktu

Wilayah Jombang yang cukup luas dengan persebaran relawan yang beragam menjadi tantangan dalam hal jangkauan pelatihan. Tidak semua relawan dapat dengan mudah mengakses lokasi pelatihan yang terpusat. Selain itu, menjaga kontinuitas pelatihan agar kesadaran bencana tidak hanya menjadi peristiwa sesaat, melainkan terus diperbarui dan ditingkatkan secara berkala, juga merupakan hal yang sulit. BPBD bisa memanfaatkan teknologi (misalnya, pelatihan daring) atau mengadakan pelatihan di berbagai titik lokasi untuk mengatasi ini.

4. Partisipasi Aktif Relawan

Meskipun relawan memiliki semangat kemanusiaan, menjaga partisipasi aktif mereka dalam setiap program peningkatan kesadaran bencana memerlukan strategi khusus. Kesibukan pribadi, kejemuhan, atau kurangnya apresiasi dapat menurunkan semangat relawan. BPBD perlu merancang program yang menarik, interaktif, dan memberikan nilai tambah bagi relawan, seperti sertifikasi atau kesempatan berjejaring.

5. Koordinasi dan Sinergi Antar Pihak

Peningkatan kesadaran bencana tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD. Diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak, seperti organisasi relawan, lembaga pendidikan, TNI/Polri, dan komunitas lokal. Tantangannya adalah menyatukan visi dan misi, serta memastikan setiap pihak menjalankan perannya secara efektif dan saling mendukung. BPBD perlu menjadi fasilitator utama dalam membangun jejaring kerja sama ini.

KESIMPULAN

BPBD Kabupaten Jombang memegang peran sentral dan krusial dalam meningkatkan kesadaran bencana di kalangan relawan. Peran ini tidak hanya terbatas pada penyediaan informasi, namun juga mencakup berbagai aspek yang saling terintegrasi untuk membentuk relawan yang tanggap, cakap, dan berdaya dalam menghadapi potensi bencana. Peran tersebut diwujudkan melalui:

1. **Penyelenggaraan Pelatihan dan Simulasi:** Secara rutin mengadakan pelatihan teknis (evakuasi, pertolongan pertama) dan manajerial (manajemen posko) yang dilengkapi simulasi realistik untuk membangun kapasitas dan kesiapan mental relawan.
2. **Penyediaan Informasi dan Sumber Daya:** Bertindak sebagai sumber

utama informasi risiko bencana dan memastikan relawan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan.

3. **Koordinasi dan Integrasi:** Mengintegrasikan relawan ke dalam sistem penanggulangan bencana yang terpadu melalui pendataan, pembentukan jejaring komunikasi, dan pembagian tugas yang jelas.
4. **Peningkatan Pengetahuan:** Meningkatkan pemahaman relawan tentang mitigasi dan adaptasi bencana melalui sosialisasi dan lokakarya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2020. *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, 78.

<https://inarisk.bnrb.go.id/pdf/BUKU IRBI 2020 KP.pdf>

Nuriana, D., Rusyidi, B., & Fedryansyah, M. (2020). Mitigasi Bencana Berbasis Sensitive Gender. *Share : Social Work Journal*, 9(2), 179.

<https://doi.org/10.24198/share.v9i2.25562>

Nurmasari, R., Rosyida, A., & Suprapto. (2016). data bencana 2016 final. In *Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana*.

peraturan daerah. (2011). *PERDA_1_2011 pembentukan BPBD Jombang.pdf*.

portal resmi pemerintah kabupaten jombang. (2021). *Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023*. Jombangkab.Go.Id.

<https://jombangkab.go.id/berita/bupati-membuka-musrenbang-penyusunan-perubahan-rpjmd-kabupaten-jombang-tahun-2018-2023>

Sugiyono. (2019). Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah. *Manajemen*, 13–20.

<https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>

UU no 24. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. In *BPK RI* (Vol. 21, Issues 5–6, pp. 1–49).

<https://doi.org/10.1080/00102208008946937>